

# MILITER DAN KAPITALISME ERSATZ: BISNIS ABRI PADA MASA ORDE BARU

Julianto Ibrahim\*

## Pendahuluan

Setelah rejim Suharto jatuh, keberadaan ABRI sebagai sebuah kekuatan sosial politik digugat oleh banyak pihak. Mereka menganggap bahwa tidak seharusnya ABRI menempati jabatan-jabatan di luar hankam yang seharusnya menjadi porsi golongan sipil.<sup>1</sup> Menurut Bilveer Singh, dalam kebanyakan masyarakat Barat, peran militer pada dasarnya adalah untuk mendukung aspirasi politik masyarakat di bawah kepemimpinan sipil.<sup>2</sup> Pernyataan ini didasarkan pada pendapat Samuel P. Huntington yang mengatakan bahwa mayoritas profesional militer di Barat menerima kekuasaan sipil sebagai hak yang sudah semestinya ada.<sup>3</sup> Oleh karena itu, ketika

militer "menyimpang" dan ikut campur tangan dalam urusan sipil, sebagaimana dikatakan oleh Taufik Abdullah, muncul kekhawatiran yang didasarkan pada asumsi bahwa tindakan ilegal telah dilakukan.<sup>4</sup>

Pemikiran yang menempatkan militer sebagai kekuatan yang mendukung sipil untuk menjalankan urusan yang menjadi "bagiannya" tidak sepenuhnya diterapkan di negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia.<sup>5</sup> Kajian-kajian yang memperlihatkan intervensi militer dalam bidang politik menunjukkan bahwa kepentingan militer dan krisis yang dihadapi suatu negara mendorong militer ikut campur tangan dalam urusan sipil. Hal itu bisa dilihat dari kajian yang dikemukakan oleh Harol Crouch<sup>6</sup>, Amos Perlmutter<sup>7</sup>, Finer<sup>8</sup> maupun Claude Welch<sup>9</sup>.

\* Sarjana Sastra, Magister Humaniora, Staf Pengajar Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- 1 Soebijono, dkk., *Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997), hlm. 1
- 2 Bilveer Singh, *Dwifungsi ABRI: Asal-Usul Aktualisasi, dan Implikasinya bagi Stabilitas dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 1
- 3 *Ibid.*, hlm. 1-2. Untuk lebih jelasnya lihat: Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*, (Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 1957).
- 4 Taufik Abdullah, "Civil-Military Relations in Third World: In Introductory Taxonomy", *Prisma*, No. 20, Maret 1981, hlm. 4; Lihat pula: Bilveer Singh, *op. cit.*, hlm. 1
- 5 Kajian Eugene Kim menunjukkan bahwa militer yang mendapat "hak istimewa" dalam urusan-urusan sipil telah dipraktekkan dengan sangat sukses di Indonesia, Korea Selatan, Republik Rakyat Cina dan Thailand. Lihat: Morris Janowitz (ed.), *Hubungan-hubungan Sipil Militer: Perspektif Regional* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 1; Sedangkan Daniel S. Lev memberikan contoh negara-negara yang dikuasai oleh militer, seperti: Nigeria, Aljazair, Irak, beberapa negara di Afrika, Amerika Selatan, Myanmar dan Indonesia. Lihat Daniel S. Lev, "ABRI dan Politik: Politik dan ABRI" dalam, *Diponegoro* 74, No. 7/th. III/April 1999, hlm. 6
- 6 Harold Crouch, "The Military and Politics in Southeast Asia" dalam Zakaria Haji Ahmad (ed.), *Military Civilizations Relations in Southeast Asia* (Singapore: Oxford University Press, 1985), hlm. 288
- 7 Amos Perlmutter, "The Comparative Analysis of Military Regime: Formations, Aspirations and Achievements", in *World Politics* No. 1, Oktober 1980, hlm. 97
- 8 S.E. Finer, *The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics* (New York: Praeger, 1962), hlm. 32-60
- 9 Claude E. Welch, *Soldier and State in Africa: A Comparative Analysis of Military Intervention and Political Change* (Evanston: Norwest University Press, 1970), hlm. 17-35

Kajian mereka memperlihatkan bahwa intervensi militer dalam segala bidang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Intervensi militer dalam bidang politik tidak dapat dipisahkan dengan penguasaan militer dalam bidang lain seperti bidang ekonomi.

Keterlibatan ABRI dalam bidang ekonomi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Orde Baru sebagai antitesis dari pemerintahan orde lama. ABRI dianggap sebagai "pemenang" dalam huru-hara peristiwa 30 September 1965 yang kebenarannya masih terus diperdebatkan sampai sekarang.<sup>10</sup> "Kemenangan" ABRI yang membawanya pada jenjang karier di pemerintahan dan kemudian menafsirkan begitu luas konsep dwifungsi ABRI disahkan negara-negara Barat dalam rangka membendung pengaruh ideologi komunis di negara-negara dunia ketiga. Kenyataan ini, seperti dikemukakan Salim Said, dalam momentum perang dingin pascaperang dunia II, serta kegagalan penerapan demokrasi parlementer di negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, telah memperlancar jalan bagi negara Barat yang kapitalistik untuk menciptakan rejim militer daripada negara jatuh dalam rejim komunis.<sup>11</sup> Rejim militer yang membentuk pemerintahan Orde Baru menjadikan pembangunan ekonomi sebagai pilihan yang rasional karena Orde Baru dibangun di atas kebangkrutan ekonomi.<sup>12</sup> Pemerintahan Orde Baru berkeyakinan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa mekanisme kontrol dari militer. Keadaan ini pernah dianalisis oleh Albert Szymanski yang mengemukakan bahwa mekanisme pemeliharaan atau pembentukan sebuah peme-

rintahan kapitalistik adalah dengan mekanisme kontrol yang militeristik.<sup>13</sup>

Keterlibatan ABRI dalam bidang ekonomi yang direkomendasikan oleh konsep dwifungsi ABRI lebih banyak berdampak negatif daripada memberi keuntungan bagi rakyat Indonesia. Menurut Nugroho Pratomo, keterlibatan ABRI dalam bidang ekonomi memiliki andil besar bagi krisis ekonomi yang melanda Indonesia.<sup>14</sup> Krisis ekonomi yang berlangsung saat ini menunjukkan adanya campur tangan begitu besar dari pemerintah yang sebagian besar berasal dari ABRI. Campur tangan pemerintah yang begitu besar dalam bidang ekonomi telah mematikan jiwa wiraswasta dan persaingan bebas. Selain itu, keterlibatan ABRI dalam bidang ekonomi, terutama bisnis, telah memunculkan militer sebagai kapitalis birokrat.<sup>15</sup> Kedudukan yang penting dalam birokrasi dan akses yang mudah dalam bidang ekonomi mendorong kapitalis birokrat militer menjual jasa dari keuntungan kedudukannya itu kepada pengusaha swasta, terutama Cina. Dalam hal ini, kapitalis birokrat militer tidak lebih sebagai kapitalis komprador atau kapitalis semu yang menjual jasa untuk memburu rente. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Yoshihara Kunio, kondisi ekonomi demikian itu merupakan bentuk dari kapitalisme *ersatz* atau kapitalisme semu.<sup>16</sup> Hal ini berarti bahwa ABRI memiliki peranan yang besar dalam pertumbuhan kapitalisme semu di Indonesia pada masa Orde Baru.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang muncul adalah sejauh manakah keterlibatan ABRI dalam bidang ekonomi terutama sektor bisnis? Seberapa besarkah

10 Perdebatan itu dapat dilihat dalam hasil diskusi yang dilakukan oleh ISAI, yang dituangkan dalam buku *Bayang-Bayang PKI* (Jakarta: Tim ISAI, 1996)

11 Iswandi, *Bisnis Militer Orde Baru: Keterkaitan ABRI dalam Bidang Ekonomi dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Rezim Otoriter* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998), hlm. 58

12 *Ibid.*, hlm. 57

13 Albert Szymanski, *The Capitalist State and the Politics of Class*, (Massachusetts: Wintrop Publisher, 1978), hlm. 264-265

14 Nugroho Pratomo, "Militer Sebagai Kekuatan Ekonomi-Politik: Studi Kasus Yayasan Kartika Eka Paksi" dalam *Diponegoro* 74, No. 7, Th. III, April 1999

15 Iswandi, *op. cit.*, hlm. 256

16 Yoshihara Kunio, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1990)

peranan ABRI dalam menciptakan kapitalisme semu di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan itu perlu diuraikan latar belakang keterlibatan ABRI dalam bisnis, konsep kapitalisme ersatz, dan peranan ABRI dalam perkembangan kapitalisme ersatz.

### Latar Belakang Keterlibatan ABRI dalam Bisnis

Keberadaan ABRI yang mendukung sistem kapitalis "ala Indonesia" tidak dapat dilepaskan dari peranan ABRI yang begitu besar dalam bidang ekonomi, terutama masa Orde Baru. Sebagai sebuah laskar rakyat atau badan-badan perjuangan yang nantinya membentuk kesatuan militer dan kelak jadi ABRI, keberadaannya sangat ditentukan oleh tersedianya dana yang cukup untuk kelangsungan hidupnya.<sup>17</sup> Pencarian dana yang dilakukan dengan cara-cara bervariasi dari tiap-tiap badan-badan perjuangan adalah penyelundupan, perdagangan candu, atau perampokan.<sup>18</sup> Selain itu, ada beberapa badan perjuangan yang membentuk organisasi perdagangan untuk memperoleh dana perjuangan. Badan-Badan perjuangan di Karawang Jawa Barat misalnya, mengorganisasikan hasil bumi petani untuk diperdagangkan di luar Jawa. Bahkan, minyak mentah pun diangkut dari Cepu untuk diperdagangkan.<sup>19</sup> Perolehan dana baik dari perdagangan candu, penyelundupan maupun perdagangan hasil bumi, biasanya dipergunakan untuk membiayai perjuangan dan membeli senjata.<sup>20</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, organisasi kemiliteran yang tidak teratur, seperti badan-badan perjuangan, telah berupaya memenuhi kebutuhan keuangannya sendiri. Organisasi militer yang teratur, seperti BKR yang kemudian berubah menjadi TRI lalu TNI, sejak konsolidasi organisasi angkatan bersenjata menjelang tahun 1950 diharuskan untuk mencari dukungan logistik sendiri dan independen dari markas besar. Hal ini berarti bahwa sejak awal ABRI sudah mengambil peran aktif dalam bidang ekonomi.<sup>21</sup>

Penerapan rasionalisasi dan reorganisasi pada 1948 dan berakhir pada 1952 oleh kabinet Hatta dengan mengurangi jumlah personil tentara telah mengakibatkan beberapa ketegangan antara pimpinan TNI dengan panglima di daerah.<sup>22</sup> Ketegangan-ketegangan itu telah memunculkan beberapa pemberontakan yang ingin membentuk pemerintahan sendiri, seperti DI/TII atau PRRI/Permesta. Para pemberontak maupun pasukan TNI harus mencari sumber dana sendiri untuk membiayai kegiatannya. Para pemberontak PRRI/Permesta dalam mencari dana menyelundupkan karet dari Sumatra dan kopra di Sulawesi ke luar wilayah.<sup>23</sup> Menurut pengakuan Jenderal Rudini, dalam penumpasan pemberontakan dari Sulawesi Selatan, usaha-usaha bisnis terpaksa dilakukan untuk menutup anggaran dan persediaan logistik yang kurang. Mereka telah membentuk yayasan dan koperasi yang menampung usaha-usaha yang dilakukan, seperti

17 Uraian mengenai badan-badan perjuangan dan hubungan di antara para anggotanya dapat dilihat dari tulisan Sartono Kartodirdjo, "Peranan Badan-Badan Perjuangan dalam Revolusi Indonesia", (Yogyakarta: Makalah Seminar, 1992)

18 Usaha perampokan ini pernah dilakukan oleh Divisi Siliwangi di daerah Ganjuran Yogyakarta pada 13 Maret 1948. Lihat: Langgeng Sulisty Budi, "Permasalahan Sosial Perkotaan pada Periode Revolusi: Kriminalitas di Yogyakarta, 1947-1948" dalam *Lembaran Sejarah*, Vol. 1, No. 2, 1997/1998, hlm. 48

19 Robert Cribb, *Gejolak Revolusi di Jakarta, 1945-1949: Pergulatan antara Otonomi dan Hegemoni* (Jakarta: Grafiti Press, 1990), hlm. 85

20 Indria Samego *et al.*, *op. cit.*, hlm. 45

21 *Ibid.*, hlm. 49

22 Rickleff, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 342

23 R.Z. Leirissa, *PRRI Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis* (Jakarta: Grafiti Press, 1997), hlm. 16; Lihat pula: Indria Samego, *op. cit.*, hlm. 50

peternakan atau pengangkutan tanah untuk proyek.<sup>24</sup>

Berbagai pemberontakan dan ketegangan yang muncul di daerah-daerah selama tahun 1950-an menyebabkan TNI merasa terbebani oleh tugas berat yang dipikulnya. Menurut Daniel Lev, beban berat yang harus dipikul oleh TNI menyebabkan adanya pemikiran agar tentara memegang peranan yang lebih besar dalam urusan negara.<sup>25</sup> Kesempatan ini terbuka lebar pada 1956-1957, yaitu dengan munculnya konflik daerah melawan pusat yang semakin memuncak. Kabinet Ali Sastroamidjojo yang berkuasa pada waktu itu mengembalikan mandat kepada presiden sehingga negara dalam keadaan darurat perang (SOB). Keadaan ini memunculkan kekhawatiran akan adanya kudeta yang dilakukan oleh tentara. Akhirnya terjadi kompromi yang memunculkan konsep "jalan tengah", yang memberikan jaminan bahwa tentara tidak akan melakukan kudeta. Tentara hanya diberi kekuasaan untuk berperan dalam bidang sosial dan politik. Konsep "jalan tengah" yang diambil dari pemikiran Nasution itu kemudian dikenal sebagai konsep dwifungsi ABRI.<sup>26</sup>

Konsep dwifungsi ABRI inilah yang nantinya memberikan peluang begitu besar bagi tentara untuk berperan dalam bidang ekonomi, terutama usaha-usaha bisnis yang dijalankannya. Usaha-usaha bisnis yang dilakukan sebelum konsep dwifungsi ini diterapkan merupakan faktor penting bagi perkembangan bisnis militer pada masa Orde Baru. Aktor-Aktor yang berperan dalam bisnis masa Orde Baru telah pula melakukan usaha bisnis sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh panglima TT-IV/Diponegoro di Jawa Tengah, Suharto. Pada Januari 1957, Suharto membentuk Yayasan Pembangunan

Teritorium Empat dengan tujuan mengadakan berbagai usaha di bidang ekonomi dan keuangan untuk memberi kemungkinan menolong petani dan orang-orang desa.<sup>27</sup> Pada masa inilah hubungan antara Cina dengan militer berjalan mesra yang terkenal dengan sebutan "Ali-Baba". Para perwira ABRI mulai bertindak dengan memberikan perlindungan kekuasaan pada pengusaha Cina, yang menjalankan roda usaha sehari-hari. Kenyataan ini bisa dilihat dari hubungan antara Panglima Divisi Diponegoro, Suharto dengan Liem Sio Liong, yang di kemudian hari, pada masa Orde Baru, menjadi salah satu jaringan ekonomi politik terkuat di Indonesia.<sup>28</sup>

Intensitas keterlibatan ABRI dalam bisnis semakin meningkat setelah pada Desember 1957 –usai kekalahan Indonesia dalam masalah Irian Barat di PBB– pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Perusahaan-perusahaan tersebut kebanyakan berupa pabrik gula, transportasi, kehutanan, perkapalan, perbankan, dan perhotelan. Nasution mengambil prakarsa supaya perusahaan-perusahaan itu ditempatkan di bawah militer. Kesempatan ini telah memperluas skala keterlibatan bisnis militer yang berkesempatan melembagakan "tradisi keterlibatan" sebelumnya sehingga membuat mereka tidak terkendali.<sup>29</sup>

Keterlibatan sistematis ABRI yang semakin tidak terkendali mulai terlihat setelah Suharto menerima jabatan sebagai presiden. Suharto yang membangun pemerintahan Orde Baru telah menempatkan kedudukan ABRI sebagai kekuatan dominan di Indonesia. Pada masa Orde Baru, format keterlibatan ABRI mulai berubah. Semula, mereka berorientasi pada *inward looking*,

24 *Ibid.*, hlm. 50

25 Daniel S. Lev, "ABRI dan Politik: Politik dan ABRI" dalam *Diponegoro* 74, No. 7, Th. III, April 1999, hlm. 8

26 *Ibid.*, hlm. 9

27 Ramadhan K.H., *Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*, (Jakarta: Citra Lamtoro Gung, 1988), hlm. 89-90.

28 Indria Samego, *op. cit.*, hlm. 53

29 *Ibid.*, hlm. 54

yaitu kurang menekankan peran di luar organisasi. Pengadopsian konsepsi baru mengenai arah perjalanan bangsa setelah terbentuknya rejim Orde Baru membuat ABRI mentransformasikan orientasinya menjadi lebih bersifat *outward looking*. ABRI juga melihat peran mereka ke luar dalam kaitannya dengan fungsi ekonomi. ABRI melihat bahwa kehadiran fisiknya dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas nasional dan bahkan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi dengan pembentukan unit-unit bisnis dalam skala besar. Terjadi perubahan, dari semata-mata upaya mencari uang untuk diri sendiri, menjadi penyedia jasa bagi pihak lain. Sementara itu, format keterlibatannya bisa berupa manajemen suatu usaha resmi atau sekadar "herder" (anjing penjaga) yang menjaga keamanan bagi pihak swasta.<sup>30</sup>

### Konsep Kapitalisme Ersatz

Pelaksanaan kapitalisme yang melibatkan modal swasta mulai berkembang di Hindia Belanda (Indonesia) pada 1870 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria. Undang-Undang Agraria itu memungkinkan pihak swasta menanamkan modalnya di perusahaan perkebunan. Pemberlakuan UU Agraria ini memungkinkan pula terbukanya kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk membuka perusahaan perkebunan.<sup>31</sup> Seiring dengan perjalanan waktu, pelaksanaan kapitalisme di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan kondisi yang berkembang dalam pemerintahan. Pada masa Orde Baru, kapitalisme berkembang begitu pesat. Akan tetapi, menurut Yoshihara Kunio, kapitalisme berkembang bukan kapitalisme yang sebenarnya, tetapi kapitalisme semu atau kapitalisme Ersatz.<sup>32</sup>

Konsep kapitalisme *ersatz* dikemukakan oleh Yoshihara Kunio dalam penelitiannya mengenai pelaksanaan kapitalisme di Asia Tenggara. *Ersatz* berasal dari bahasa Jerman yang berarti "substitusi" atau pengganti. Kata ini kemudian dipakai dalam bahasa Inggris dengan arti sebagai "pengganti yang lebih inferior". Oleh karena itu, kapitalisme *ersatz* berarti kapitalisme substitusi yang lebih inferior. Kapitalisme *ersatz* dapat berarti pula kapitalisme yang tidak tulus.<sup>33</sup>

Yoshihara mengasumsikan bahwa kapitalisme tidak *ersatz* merupakan kapitalisme dinamis yang menggejala di Eropa pada abad ke-19. Kapitalisme seperti ini berhasil membawa kawasan Eropa Barat keluar dari sistem feodal dan masuk ke dalam kapitalisme industri sehingga melahirkan kemajuan teknologi dan ekonomi yang luar biasa. Kapitalisme dinamis ini menggejala pula di Amerika dan Jepang.<sup>34</sup>

Menurut Yoshihara, kapitalisme di Asia Tenggara, terutama Indonesia, menjadi *ersatz* disebabkan oleh dua hal, yaitu: pertama, campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi terlalu banyak sehingga mengganggu persaingan bebas dan membuat kapitalisme tidak dinamis. Hal ini menimbulkan tumbuhnya pencari rente di kalangan birokrat pemerintah sehingga wiraswastawan sesungguhnya tidak bisa berkembang. Di samping itu, campur tangan pemerintah itu juga kekuatan ekonomi pengusaha-pengusaha keturunan Cina, yang melalui koneksinya dengan para birokrat negara, berhasil memperoleh fasilitas-fasilitas khusus bagi usahanya. Kedua, kapitalisme *ersatz* di Asia Tenggara tidak didasarkan pada perkembangan teknologi yang memadai.<sup>35</sup>

30 *Ibid.*, hlm. 63

31 Sartono Kartodirdjo dan Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Aditya Media, 1994), hlm. 80

32 Yoshihara Kunio, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, terj. Setiawan Abadi (Jakarta: LP3ES, 1990)

33 Uraian ini diambil dari pendapat Arief Budiman, "Kapitalisme Ersatz: Sebuah Pengantar" dalam Yoshihara Kunio, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. xii

34 *Ibid.*, hlm. xiv

35 *Ibid.*, hlm. xiv

Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Yoshihara Kunio di atas, terciptanya kapitalisme *ersatz* di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peranan ABRI. Keterlibatan ABRI di segala aspek kehidupan kenegaraan, terutama dalam bidang politik dan ekonomi, telah mengantarkan ABRI sebagai kekuatan yang mendominasi ekonomi dengan mematikan persaingan bebas.

### Pengaruh ABRI terhadap Terbentuknya Kapitalisme Ersatz

Munculnya rejim Orde Baru di bawah kepemimpinan Suharto telah menempatkan militer sebagai kekuatan yang paling dominan di Indonesia. ABRI tidak saja melakukan intervensi dalam urusan politik, tetapi juga dalam bidang-bidang lain, termasuk sosial dan ekonomi. Menurut Indria Samego, keterlibatan ABRI dalam bidang ekonomi, terutama bisnis, semakin signifikan setelah pemerintahan Orde Baru pada tahun 1970-an memberikan peluang yang besar bagi perkembangan usahawan nasional. Selanjutnya, Samego mengemukakan bahwa peran negara yang dikuasai oleh militer begitu besar dalam bidang ekonomi karena tiadanya golongan menengah sebagai agen perubahan.<sup>36</sup> Pendapat Samego ini didasarkan pada pendapat Nodlinger yang mengemukakan bahwa terdapat tiga faktor pendorong keterkaitan militer terhadap bisnis, yaitu: peluang, tradisi, dan keberadaan personil militer yang terdiri dari kalangan menengah bawah.<sup>37</sup>

Keterlibatan ABRI dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari keterlibatannya dalam BUMN maupun sektor-sektor ekonomi lainnya yang dinaungi oleh yayasan-yayasan. Dalam praktiknya, keterlibatan ABRI dalam bidang ekonomi secara kelembagaan banyak bekerja sama dengan

pihak swasta, yang juga berlatar belakang para pengusaha dalam faksi militer, seperti pengusaha militer generasi kedua. Para pengusaha militer ini tidak saja mengelola aktivitas ekonomi. Mereka juga memiliki peranan penting dalam birokrasi secara langsung maupun tidak langsung. Kedudukan dalam birokrasi yang bercampur aduk dengan kepentingan bisnis inilah yang kemudian melahirkan para kapitalis birokrat militer.<sup>38</sup>

Para kapitalis birokrat militer yang memiliki kemudahan-kemudahan fasilitas dalam bidang ekonomi itu menjual jasa birokrasi mereka atau jasa keahlian strategi kemiliteran mereka kepada para konglomerat di Indonesia. Berbagai macam kemampuan yang mereka miliki, termasuk dalam hal *lobby* untuk menembus akses-akses ekonomi dan keuangan, dimanfaatkan oleh para pengusaha, terutama para pengusaha Cina. Modus semacam ini telah memunculkan fenomena ganda: (1) bangkitnya para pengusaha klien yang memanfaatkan para birokrat militer; (2) bangkitnya *rent-capitalist* birokrat militer yang menjual jasa mereka.

Keberadaan ABRI sebagai *rent-capitalist* birokrat militer menunjukkan peranan ABRI sebagai penopang kapitalisme *ersatz* di Indonesia. Kedudukan birokrat militer ABRI sebagai *rent capitalist*, sebagaimana dikatakan oleh Kunio, sebagai kapitalis komprador ABRI bertindak sebagai agen industri manufaktur asing di negerinya sendiri.<sup>39</sup> Kapitalis komprador ini merupakan kapitalis semu yang dapat diartikan sebagai sekelompok pengusaha yang sangat bergantung pada negara dan tidak mampu berdiri sendiri atau berusaha sendiri.<sup>40</sup> Hal ini berarti bahwa dalam kapitalisme *ersatz* campur tangan negara begitu kuat sehingga menghilangkan ciri-ciri persaingan yang terdapat dalam kapitalisme murni.

36 Indria Samego, *et al.*, *op.cit.*, hlm. 27

37 Lihat: Eric A. Nodlinger, *Soldier in Politics: Military Coup and Governments* (Englewood Cliffs, NJ.: Practice Hall, 1977)

38 Iswandi, *op. cit.*, hlm. 255

39 Yoshihara Kunio, *op. cit.*, hlm. 2-4

40 Indria Samego, *op. cit.*, hlm. 133

42 Harold Crouch, *Miller dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986)41 Iswandi, *op. cit.*, hlm. 259

Keterlibatan ABRI dalam urusan bisnis tidak hanya berlangsung pada masa Orde Baru, tetapi telah dimulai pada saat bangsa Indonesia bersama-sama berjuang memper-tahanakan kemerdekaan. Badan-badan perjuangan yang menjadi embrio ABRI mempunyai inisiatif bisnis untuk memperoleh dana perjuangan yang dipergunakan untuk membiayai kelangsungan perjuangan dan memperoleh senjata. Naluri bisnis itu semakin berkembang manakala rejim Orde Baru di bawah Presiden Suharto memberi "hak istimewa" di segala bidang, termasuk kemudahan dalam berbisnis.

### Kesimpulan

Para kapitalis birokrat militer yang merupakan kapitalis komprador atau kapitalis menumpang kapitalisme semu mempunyai kepentingan terhadap jalannya pemba-ngunan dengan keterlibatannya dalam perencanaan-perencanaan yang ditetapkan oleh Bappenas. Para birokrat militer ini telah mengarahkan birokrasi di Indonesia tidak lagi berfungsi sebagai *public service*, tetapi beralih fungsi sebagai pelayanan kepentingan para faksi yang tergabung dalam desain besar kepentingan pemerintahan pretorian *co-ruler* yang terlibat dalam bidang ekonomi. Peralihan fungsi birokrasi itu telah memunculkan kegiatan-kegiatan prosedural dalam aktivitas ekonomi. Para kapitalis semu tersebut berusaha mengelola proyek-proyek dengan cara tertutup, dengan kriteria-kriteria tertentu yang tidak wajar, seperti proyek-proyek yang dicanangkan pemerintah untuk dikelola swasta dengan predikat tender tertutup, proyek dalam skala prioritas, proyek dengan lisensi khusus, proyek untuk ditanamagakan atau dimonopolikan dan beberapa kriteria lain, yang pada muaranya hanya untuk kepentingan pembesaran ekskalasi keterlibatan para kapitalis birokrat militer dan *rent-capitalist* birokrat militer dalam bidang ekonomi.<sup>41</sup>

Berbagai aktivitas ekonomi yang melibatkan para kapitalis birokrat militer ini memperhatikan hilangnya persaingan sehat dalam berusaha. Pengelolaan tender-tender dalam proyek-proyek yang dilisensikan maupun proyek yang dimonopolikan menunjukkan tidak sehatnya persaingan yang terjadi. Sementara itu, keterlibatan militer dalam ekonomi juga terdiri dari para birokrat negara yang mempunyai akses dalam pengambilan keputusan memperhatikan bidang ekonomi terlalu besar. Kenyataan seperti ini telah memampukkan kapitalisme di Indonesia tidak lebih sebagai kapitalisme semu. Kapitalisme tidak asli, tidak tulen dan jauh dari persaingan sehat yang dinamis.

Para kapitalis birokrat militer yang merupakan kapitalis komprador atau kapitalis menumpang kapitalisme semu melihat kepentingannya lebih sejajar dengan para investor asing mitra usahanya, daripada dengan sebagian besar rakyat Indonesia.<sup>42</sup> Dari sisi lain, kemitraan usaha tersebut menimbulkan hal yang kini dikenal sebagai kolusi antara kapitalis birokrat militer dengan pengusaha keturunan Cina atau asing. Para kapitalis birokrat militer tersebut menjual jasa-jasa mereka kepada para pengusaha swasta atau mengkomersialkan institusi birokrasinya sebagai fasilitas ekonomi. Dari aktivitas semacam ini, akan muncul ekonomi biaya tinggi atau terbuka-nya peluang korupsi dengan menarik biaya setiap ada perizinan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi. Para kapitalis birokrat militer ini juga menciptakan klien-klien dan konco-konco (*crony*) bisnis dalam sejumlah besar pemburu rente. Bagi para pengusaha militer maupun yang berafiliasi dengan militer, pemburuan rente merupakan strategi paling logis karena pemerintah tidak hanya memegang kekuasaan dengan leluasa, tetapi juga menguasai sejumlah modal yang sama sekali melalui bank-bank dan perusahaan-perusahaan negara/BUMN.

Pada masa Orde Baru, para perwira ABRI tidak hanya mempunyai kedudukan penting dalam birokrasi, tetapi juga memiliki kemudahan akses dalam bidang ekonomi. Kedudukan militer dalam birokrasi yang kemudian dicampuradukkan dengan urusan-urusan bisnis telah melahirkan para kapitalis birokrat di kalangan ABRI. Kebijakan-kebijaksanaan birokrasi yang juga berbisnis ini memiliki nuansa diskriminasi yang mementingkan bisnisnya dan *crony-crony*-nya. Proyek-proyek ekonomi bersifat tertutup dan dijalankan dengan penuh rekayasa. Campur tangan para birokrat yang kuat telah mematikan persaingan sehat dalam bisnis. Oleh karena itu, berkembang istilah yang menggambarkan keadaan ekonomi yang tidak sehat tersebut dengan kapitalisme *ersatz*.

ABRI merupakan penopang paling dominan terhadap kapitalisme *ersatz* di Indonesia, selain pihak pengusaha swasta lainnya terutama Cina. Kapitalis birokrat militer itu tidak lebih dari kapitalis komprador atau kapitalis semu yang memburu rente dengan menjual jasa kepada pengusaha swasta terutama Cina. Keterlibatan ABRI dalam berbisnis ini telah menyuburkan pula budaya kolusi, korupsi, dan nepotisme yang menyebabkan krisis ekonomi berkepanjangan di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Taufik. "Civil-Military Relations in Third World: In Introductory Taxonomy". *Prisma*, No. 20, Maret 1981.
- Ahmad, Zakaria (ed.). 1985. *Military Civilizations Relations in South East Asia*. Singapore: Oxford University Press.
- Budi Langgeng Sulistyono. "Permasalahan Sosial Perkotaan pada Periode Revolusi: Kriminalitas di Yogyakarta, 1947-1948". Dalam *Lembaran Sejarah*, Vol. 1, No. 2, 1997/1998.
- Cribb, Robert. 1990. *Gejolak Revolusi di Jakarta, 1945-1949: Pergulatan antara Otonomi dan Hegemoni*. Jakarta: Grafiti Press.
- Crouch, Harold. 1986. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Finer, S.E. 1962. *The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics*. New York: Praeger.
- Huntington, Samuel P. 1957. *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.
- Iswandi. 1998. *Bisnis Militer Orde Baru: Keterkaitan ABRI dalam Bidang Ekonomi dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Rezim Otoriter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Janowitz, Morris (ed.). 1985. *Hubungan-Hubungan Sipil Militer: Perspektif Regional*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kartodirdjo Sartono. 1992. "Peranan Badan-Badan Perjuangan dalam Revolusi Indonesia". *Makalah Seminar*. Yogyakarta.
- Kartodirdjo Sartono dan Djoko Suryo. 1994. *Sejarah Perkebunan Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media.
- K.H. Ramadhan. 1988. *Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya*. Jakarta: Citra Lamtoro Gung.
- Kunio, Yoshihara. 1990. *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*. Terj. Setiawan Abadi. Jakarta: LP3ES.
- Leirissa R.Z. 1997. *PRRI Permesta: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta: Grafiti Press.
- Lev, Daniel S. "ABRI dan Politik: Politik dan ABRI". Dalam *Diponegoro* 74, No. 7, Th. III, April 1999.
- Nodlinger, Eric A. 1977. *Soldier in Politics: Military Coup and Governments*. Englewood Cliffs, NJ.: Practice Hall.

- Perlmutter, Amos. "The Comparative Analysis of Military Regime: Formations, Aspirations and Achievements". In *World Politics* No. 1, Oktober 1980.
- Pratomo Nugroho. "Militer Sebagai Kekuatan Ekonomi-Politik: Studi Kasus Yayasan Kartika Eka Paksi". Dalam *Diponegoro* 74, No. 7, Th. III, April 1999.
- Ricklefs. 1995. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Samego Indria et al. 1998. *Bila ABRI Berbisnis*. Bandung: Mizan.
- Singh, Bilveer. 1996. *Dwifungsi ABRI: Asal-Usul Aktualisasi, dan Implikasinya bagi Stabilitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Soebijono dkk. 1997. *Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Szimansky, Albert. 1978. *The Capitalist State and the Politics of Class*. Massachusetts: Wintrop Publisher.
- Tim ISAI. 1996. *Bayang-Bayang PKI*. Jakarta.
- Welch, Claude E. 1970. *Soldier and State in Africa: A Comparative Analysis of Military Intervention and Political Change*. Evanston: Northwest University Press.